

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lingkungan hidup menjadi faktor utama dalam pembangunan berkelanjutan karena kualitasnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan hidup manusia (Muhammad, 2022). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berfungsi sebagai tolak ukur yang menilai kondisi lingkungan secara menyeluruh berdasarkan empat komponen utama, yaitu kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut (KLHK, 2020). IKLH dianggap indikator kunci dalam menilai keberhasilan pembangunan berkelanjutan karena indikator ini mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, bukan hanya fokus pada aspek ekonomi semata (Syam, 2015). Penelitian ini memfokuskan lokasi Provinsi Jawa Timur karena wilayah ini memiliki karakteristik lingkungan serta tekanan pembangunan yang tinggi (BPS, 2021).

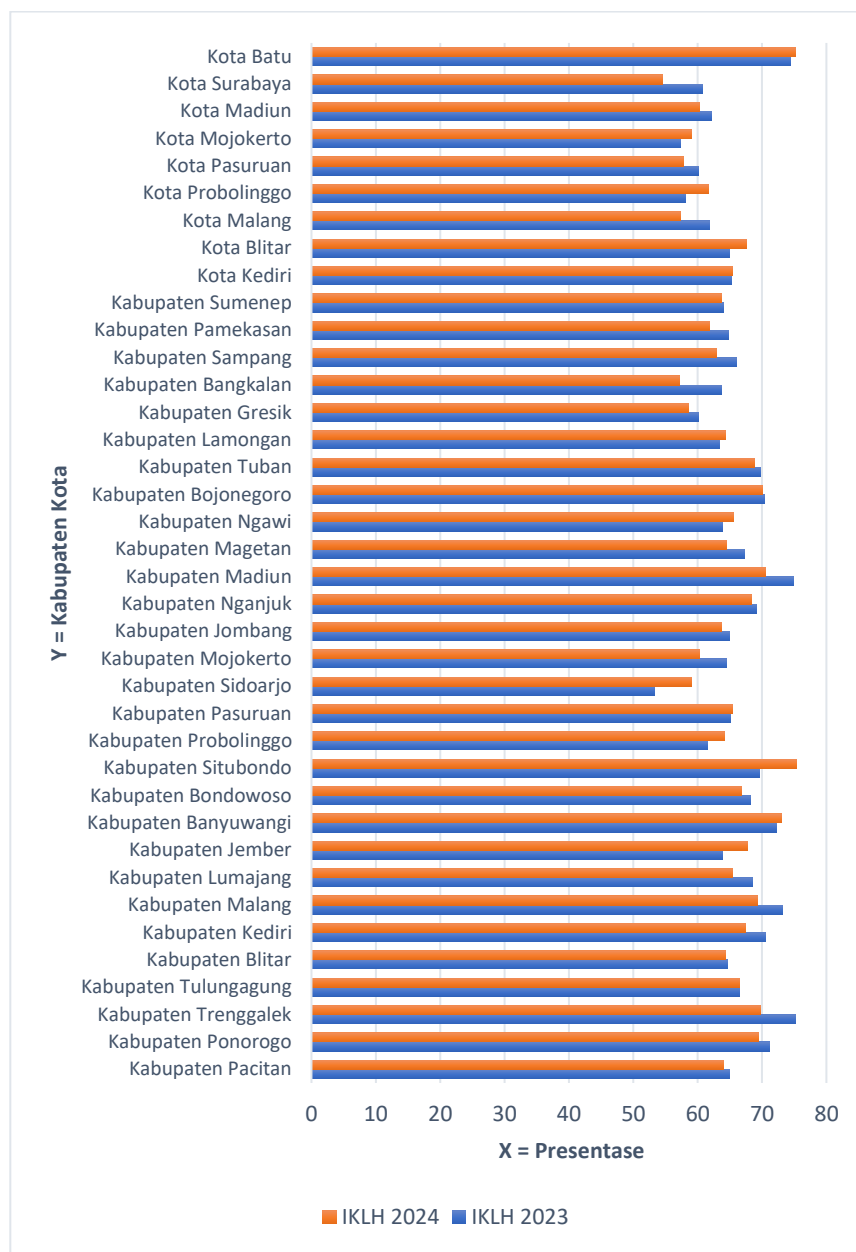
Jawa Timur menempati peringkat menengah dalam capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara nasional (KLHK, 2023). Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan aktivitas ekonomi, industri, dan jumlah penduduk terbesar di Indonesia (Bappenas, 2025). Pertumbuhan sektor industri pengolahan yang terus meningkat memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, namun di sisi lain aktivitas industri menghasilkan limbah dan emisi yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup (Waluyo, 2025). Hal ini menjadikan IKLH penting digunakan untuk melihat apakah pembangunan ekonomi yang terjadi masih sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. sehingga menarik untuk diteliti faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kerangka Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur (RPJMD) 2021-2026 juga mencantumkan bahwa IKLH sebagai salah satu

indikator kinerja yang harus dipenuhi dalam strategi pengelolaan lingkungan hidup. Provinsi Jawa Timur menunjukkan ketimpangan antar kabupaten/kota dalam kualitas air, udara, tutupan lahan dan air laut, misalnya antara daerah industri seperti Surabaya dan Gresik dengan daerah agraris seperti Malang dan Kediri. Ketimpangan tersebut menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi yang representatif untuk menganalisis keberhasilan pembangunan berkelanjutan berbasis IKLH (KLHK, 2022). Kondisi ini mencerminkan perbedaan tekanan lingkungan di masing-masing wilayah karena dipengaruhi oleh tingkat aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk (Latifa, 2025).

Nilai IKLH tidak hanya menunjukkan kondisi lingkungan pada suatu periode tertentu, tetapi juga mencerminkan dinamika perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, analisis terhadap IKLH diperlukan untuk mengetahui arah perkembangan kualitas lingkungan, apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau fluktuasi dalam periode tertentu (KLHK, 2023). IKLH juga berfungsi sebagai alat evaluasi dalam menilai efektivitas kebijakan pengelolaan lingkungan yang telah diterapkan, sehingga dapat menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan ke depan (Setiawa, 2021).

Perbedaan karakteristik wilayah menyebabkan adanya variasi nilai IKLH antar kabupaten maupun kota (Aldilla et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan tidak bersifat homogen, melainkan dipengaruhi oleh kondisi geografis, ekologi, serta tingkat tekanan terhadap lingkungan di masing-masing daerah (Singh, 2022). Oleh karena itu, penting untuk melihat distribusi dan perbandingan nilai IKLH pada tingkat kabupaten maupun kota guna memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi lingkungan di setiap wilayah.



Sumber: Data diolah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024.

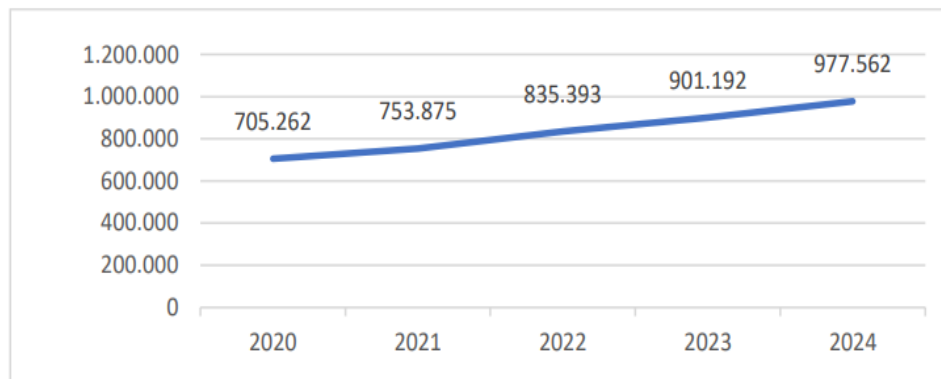
**Gambar 1. 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Di Jawa Timur Tahun 2023-2024**

Menurut gambar 1.1 oleh Data IKLH kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2023–2024 yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2024) meskipun secara umum terlihat adanya kenaikan skor di beberapa daerah, kondisi ini belum sepenuhnya menunjukkan kualitas

lingkungan yang aman dan stabil. Sebagian besar nilai IKLH masih berada pada rentang 60-70 yang tergolong kategori sedang atau cukup baik (Apriani *et al.*, 2025), sementara hanya sedikit daerah yang konsisten berada di atas angka 75. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur masih berada pada level yang rentan terhadap tekanan pembangunan dan aktivitas ekonomi Kehutanan (KLHK, 2024).

Wilayah perkotaan dan kawasan industri memang menunjukkan peningkatan nilai, namun kenaikan tersebut relatif tipis dan belum merata (Yulin, 2022). Masih terdapat kabupaten/kota dengan nilai IKLH di bawah 65 yang mengindikasikan adanya tekanan terhadap kualitas air, udara, tutupan lahan dan air laut (Zulkifli, 2024). Kondisi ini menjadi sinyal bahwa proses pembangunan di Jawa Timur belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Muhammad, 2022). Apabila nilai masih berada pada kategori sedang, maka artinya masih terdapat permasalahan pencemaran air, degradasi lahan, atau tekanan emisi yang memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional (BPS, 2023). Ekspansi sektor manufaktur menimbulkan konsekuensi lingkungan berupa pencemaran air, pencemaran udara, serta degradasi lahan akibat limbah produksi. Dampak tersebut merupakan eksternalitas negatif yang umum terjadi, terutama ketika penerapan teknologi hijau dan pengelolaan limbah di tingkat unit usaha belum optimal (Muhammad, 2022).



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 1. 2 Pertumbuhan sektor industri pengolahan Jawa Timur, 2020-2024**

Berdasarkan gambar 1.2 Pertumbuhan sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2020 sampai 2024 yang didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 nilai PDRB tercatat sebesar Rp. 705.262, kemudian meningkat menjadi Rp. 753.875 pada 2021, Rp. 835.393 pada Rp. 2022, 901.192 pada 2023, dan mencapai Rp. 977.562 pada 2024. Tren kenaikan yang stabil tersebut menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur (BPS, 2024). Namun peningkatan aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas lingkungan hidup yang searah.

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Timur selama periode yang sama cenderung berfluktuasi, sehingga menunjukkan adanya indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih dihadapkan pada tantangan lingkungan yang cukup besar. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori eksternalitas yang dikemukakan oleh Pigou (1920). Teori eksternalitas menjelaskan bahwa aktivitas produksi dan konsumsi sering kali menimbulkan

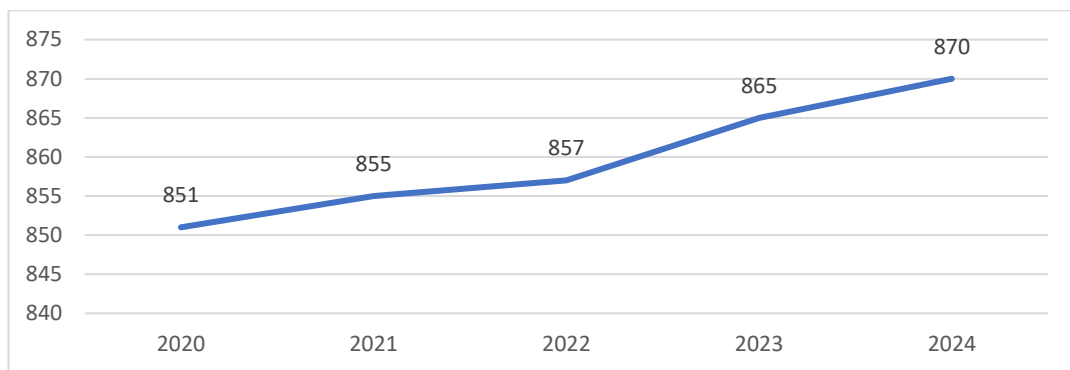
dampak yang tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam mekanisme pasar. Peningkatan aktivitas produksi dalam sektor industri tidak hanya menghasilkan *output* ekonomi berupa barang dan jasa, tetapi juga menghasilkan dampak sampingan berupa limbah cair, limbah padat, emisi gas buang, serta eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Dampak tersebut tidak seluruhnya ditanggung oleh perusahaan sebagai pelaku produksi, melainkan juga dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pencemaran udara, pencemaran air, penurunan kualitas kesehatan, dan berkurangnya kualitas lingkungan hidup (Muhammad, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya biaya sosial (*social cost*) yang lebih besar dibandingkan biaya privat (*private cost*) yang ditanggung oleh pelaku usaha (Mankiw, 2019). Hubungan antara pertumbuhan aktivitas industri dan penurunan kualitas lingkungan tersebut sejalan dengan hipotesis *Environmental Kuznets Curve* (EKC) yang menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, peningkatan aktivitas produksi dan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh meningkatnya degradasi lingkungan akibat bertambahnya eksploitasi sumber daya alam dan emisi polutan (Yusuf *et al.*, 2021).

Pertumbuhan sektor industri pengolahan yang terus meningkat di Provinsi Jawa Timur berpotensi memperbesar eksternalitas negatif terhadap lingkungan hidup sebelum mencapai titik balik (*turning point*) yang memungkinkan perbaikan kualitas lingkungan melalui kemajuan teknologi, peningkatan pendapatan, dan penguatan kebijakan lingkungan (Pertiwi *et al.*, 2021).

Kondisi Jawa Timur saat ini berpotensi menghadapi *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Prasetyo, 2022). Tekanan lingkungan di Provinsi Jawa Timur tidak hanya bersumber dari aktivitas ekonomi,

tetapi juga dipicu oleh tingginya kepadatan penduduk (Juni *et al.*, 2025). Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah dalam luas tertentu (Feng *et al.*, 2021). Data ini penting untuk mengetahui tingkat konsentrasi penduduk serta potensi permasalahan maupun peluang pembangunan di suatu daerah.



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 1. 3 Kepadatan Penduduk Jawa Timur Tahun 2020-2024**

Menurut gambar 1.3 Kepadatan penduduk Jawa Timur pada tahun 2025 berdasarkan badan statistik Jawa Timur mencapai rata-rata 876 jiwa per km<sup>2</sup>, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah perkotaan seperti Surabaya sebesar 870 jiwa/km<sup>2</sup> dan Sidoarjo sebesar 3.030 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS, 2025). Ketimpangan distribusi penduduk tersebut mendorong alih fungsi lahan secara masif, terutama konversi lahan pertanian produktif menjadi permukiman dan kawasan industri yang mencapai sekitar 5.212 hektar per tahun (Kementerian ATR/BPN, 2024). Meningkatnya kepadatan penduduk tersebut berdampak pada peningkatan kebutuhan terhadap berbagai sumber daya, seperti lahan permukiman, air bersih, energi, serta infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat (Dimnwobi *et al.*, 2021).

Kepadatan penduduk yang tinggi juga berpotensi meningkatkan volume limbah dan pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas manusia (Blackwell,

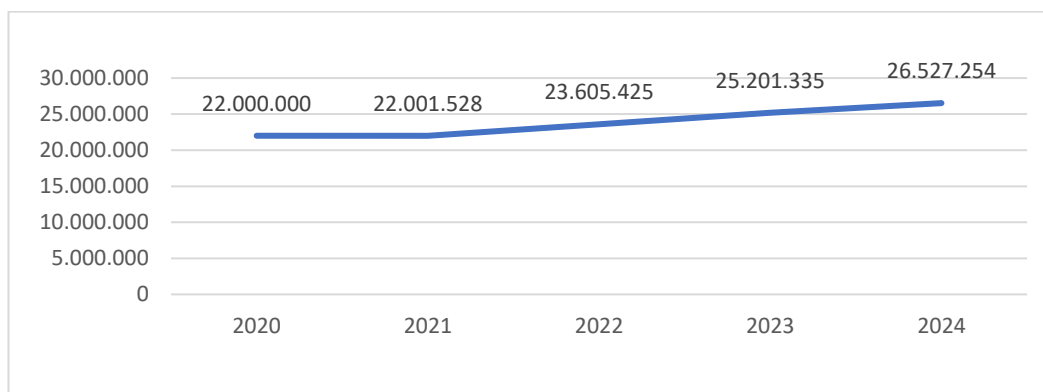
2012). Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan yang semakin besar terhadap lingkungan hidup di wilayah Jawa Timur dimana banyaknya penduduk yang tidak diiringi luasnya wilayah akan menyebabkan salah guna penggunaan lahan hijau, hal tersebut menunjukkan adanya eksternalitas negatif karena dampak lingkungan yang dihasilkan tidak sepenuhnya ditanggung oleh individu atau rumah tangga sebagai pelaku aktivitas, melainkan juga dirasakan oleh masyarakat secara luas dalam bentuk penurunan kualitas air, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta meningkatnya pencemaran lingkungan eksternalitas negatif.

Kerusakan lingkungan yang dihasilkan tidak hanya menjadi tanggungan individu atau rumah tangga sebagai pelaku aktivitas, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat luas melalui penurunan kualitas air, penyusutan ruang terbuka hijau, dan meningkatnya pencemaran (Feng *et al.*, 2021). Perubahan penggunaan lahan menyebabkan penurunan tutupan lahan secara signifikan. Hutan primer di kawasan hulu seperti Kota Batu mengalami penyusutan hingga 352 hektare dalam dua dekade terakhir, sementara wilayah pesisir Pantura mengalami penurunan luas mangrove yang memperparah abrasi dan banjir rob (Kholik *et al.*, 2022). Kondisi tersebut mencerminkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan (*carrying capacity*), yaitu kemampuan suatu wilayah dalam menopang kehidupan populasi secara berkelanjutan (Pigou, 1920).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa daya dukung penduduk Jawa Timur berada pada kisaran 43,9 juta jiwa, sedangkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 telah mencapai 42,09 juta jiwa (Atikah, 2025). Selisih tersebut menunjukkan posisi wilayah yang mendekati batas kapasitas maksimum atau kondisi overshoot. Bukti empiris memperkuat kondisi tersebut melalui terjadinya defisit air bersih, di

mana ketersediaan air hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar 15,6 juta jiwa dari total populasi yang melebihi 40 juta jiwa (Badan Hidrologi Jawa Timur, 2022).

Peningkatan jumlah penduduk pastinya tidak lepas dengan aspek lain yang turut menga]mbarkan dinamika aktivitas masyarakat yaitu kendaraan bermotor (Angelisa, 2025), data kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat mobilitas serta aktivitas ekonomi diasuatu wilayah secara lebih komprehensif.



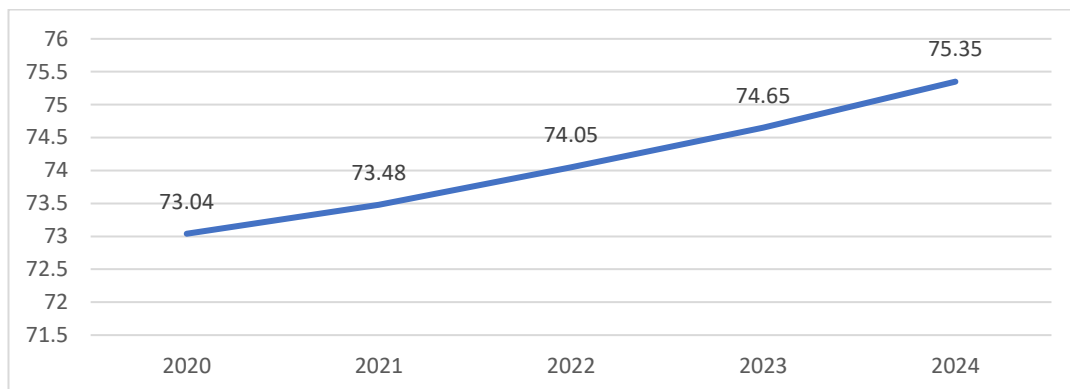
Sumber: BPS, 2025.

**Gambar 1. 4 Jumlah Kendaraan bermotor tahun 2020-2024**

Berdasarkan gambar 1.4 grafik menunjukkan pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur sepanjang 2020–2024. Pada tahun 2020 tercatat sekitar 22 juta unit, lalu angka ini meningkat secara bertahap hingga melampaui 26,5 juta unit pada 2024. Kenaikan tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat dan menguatnya aktivitas ekonomi yang mendorong kepemilikan kendaraan pribadi. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dapat dianalisis melalui perspektif teori eksternalitas yang menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi sering menimbulkan dampak yang tidak tercermin dalam mekanisme harga pasar.

Pigou (1920) menyatakan bahwa eksternalitas terjadi ketika aktivitas individu atau pelaku ekonomi memberikan dampak terhadap pihak lain tanpa adanya kompensasi yang memadai. Penggunaan kendaraan pribadi dalam sektor transportasi tidak hanya memberikan manfaat berupa kemudahan mobilitas, tetapi juga menimbulkan eksternalitas negatif seperti kemacetan, polusi udara, kebisingan, dan risiko kecelakaan (*The Economics of Welfare; World Health Organization*). Berbagai studi menunjukkan bahwa sektor transportasi merupakan salah satu sumber utama eksternalitas lingkungan dan sosial, di mana biaya yang ditimbulkan tidak sepenuhnya ditanggung oleh pengguna kendaraan (Qin *et al.*, 2021).

Kerusakan kualitas lingkungan tidak hanya disebabkan itu saja melainkan juga bisa di sebabkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam perspektif teori ekologi dijelaskan bahwa interaksi antara manusia dan lingkungan bersifat timbal balik, sehingga peningkatan kualitas pembangunan manusia akan mempengaruhi kondisi lingkungan (Anindita *et al.*, 2023). Peningkatan IPM yang ditandai oleh perbaikan Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan mendorong peningkatan konsumsi dan aktivitas ekonomi, termasuk kendaraan bermotor dan eksploitasi sumber daya alam, kondisi ini memperbesar tekanan terhadap lingkungan dan berpotensi menurunkan IKLH apabila tidak di iringi dengan pengelolaan yang berkelanjutan (Hidayatno. *et al.*, 2019).



Sumber: BPS, 2025

**Gambar 1. 5 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur Tahun 2020-2024**

Berdasarkan gambar 1.5 Indeks pembangunan manusia provinsi Jawa Timur selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang terus meningkat pada tahun 2020 IPM tercatat sebesar 73.04, kemudian terus mengalami peningkatan hingga 2024 sebesar 75.35. Peningkatan IPM secara konseptual seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan yang pastinya penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Perspektif Pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa kesejahteraan manusia yang meningkat seharusnya diiringi dengan perbaikan kualitas lingkungan sebagai bagian kualitas hidup yang utuh (Todaro, 2015).

Permasalahan muncul ketika peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak diikuti dengan kesadaran ekologis dan kebijakan yang berwawasan lingkungan. Aktivitas ekonomi yang semakin intensif, peningkatan konsumsi masyarakat, serta perkembangan teknologi yang belum sepenuhnya ramah lingkungan menyebabkan hubungan yang seharusnya positif antara IPM dan kualitas lingkungan tidak selalu tercapai (Septyanto, 2022).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan teoritis dan realitas empiris, di mana peningkatan IPM justru dapat diiringi oleh penurunan kualitas lingkungan (Stern, 2024). Temuan ini juga didukung oleh studi empiris lain

yang menunjukkan bahwa pertumbuhan pembangunan tidak selalu sejalan dengan perbaikan kualitas lingkungan (Shafik, 1994). Berdasarkan uraian permasalahan, tekanan terhadap kualitas lingkungan di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh aktivitas industri, kepadatan penduduk, serta peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang menimbulkan eksternalitas negatif dan mencerminkan kegagalan pasar (*market failure*) (The Economics of Welfare). Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur diduga dipengaruhi oleh aktivitas sektor industri pengolahan, kepadatan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah kendaraan bermotor.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori eksternalitas yang dikemukakan oleh Pigou (1920), yang menyatakan bahwa aktivitas ekonomi dan sosial sering kali menimbulkan dampak yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelaku kegiatan, melainkan juga oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini, aktivitas industri pengolahan dan penggunaan kendaraan bermotor berpotensi menghasilkan eksternalitas negatif berupa pencemaran udara, pencemaran air, emisi gas buang, serta eksploitasi sumber daya alam. Sementara itu, tingginya kepadatan penduduk dapat meningkatkan tekanan terhadap lingkungan melalui peningkatan kebutuhan lahan, energi, dan sumber daya alam, sedangkan peningkatan IPM dapat menghasilkan eksternalitas positif maupun negatif tergantung pada pola konsumsi dan kesadaran lingkungan masyarakat.

Besarnya eksternalitas yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan (*carrying capacity*), yaitu kemampuan lingkungan dalam menyediakan sumber daya alam dan menyerap limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Ketika tekanan

lingkungan terus meningkat dan melampaui kapasitas yang dimiliki lingkungan, maka kualitas lingkungan hidup berpotensi mengalami penurunan. Hubungan tersebut juga diperkuat oleh hipotesis *Environmental Kuznets Curve* (EKC) yang menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, peningkatan aktivitas ekonomi cenderung diikuti oleh meningkatnya degradasi lingkungan akibat bertambahnya eksternalitas negatif yang dihasilkan.

Teori Ekologi Manusia (*Human Ecology*) menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi, pertumbuhan penduduk, kualitas manusia, dan perkembangan teknologi merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang dapat memengaruhi kondisi ekologis suatu wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh sektor industri pengolahan, kepadatan penduduk, IPM, dan jumlah kendaraan bermotor terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antarvariabel, baik secara parsial maupun simultan. Oleh karena itu, hubungan tersebut dianalisis menggunakan pendekatan model statis dalam ekonometrika.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi regresi linier berganda dan regresi data panel statis, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis pengaruh antarvariabel dalam periode waktu yang sama serta mengontrol heterogenitas yang tidak teramati pada setiap objek penelitian (Gujarati, 2013). Untuk memperkuat landasan konseptual penelitian, bagian selanjutnya akan membahas tinjauan pustaka yang mencakup teori-teori relevan dan hasil penelitian terdahulu.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh tingkat industrialisasi (kontribusi sektor industri pengolahan) terhadap kualitas lingkungan hidup di kabupaten kota Provinsi Jawa Timur periode 2015-2024?
2. Apakah Kepadatan penduduk berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup di kabupaten kota Provinsi Jawa Timur periode 2015-2024?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup di kabupaten kota Provinsi Jawa Timur periode 2015-2024?
4. Apakah Jumlah Kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup di kabupaten kota Provinsi Jawa Timur 2015-2024
5. Bagaimana pengaruh simultan kepadatan penduduk, tingkat industrialisasi, IPM dan Jumlah Kendaraan bermotor terhadap kualitas lingkungan hidup di kabupaten kota Provinsi Jawa Timur periode 2015– 2024?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh tingkat industrialisasi (kontribusi sektor industri pengolahan) terhadap kualitas lingkungan hidup di kabupaten kota Provinsi Jawa Timur periode 2015-2024?
2. Menganalisis pengaruh Kepadatan penduduk terhadap kualitas lingkungan hidup di kabupaten kota Provinsi Jawa Timur periode 2015-2024
3. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kualitas lingkungan hidup di kabupaten kota Provinsi Jawa Timur periode 2015- 2024

4. Menganalisis pengaruh Jumlah Kendaraan bermotor terhadap kualitas lingkungan hidup di kabupaten kota Provinsi Jawa Timur 2015-2024
5. Menganalisis pengaruh simultan kepadatan penduduk, tingkat industrialisasi, IPM dan Jumlah Kendaraan bermotor terhadap kualitas lingkungan hidup di kabupaten kota Provinsi Jawa Timur periode 2015– 2024